

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, perkembangan keuangan syariah di dunia semakin pesat. Hal tersebut salah satunya didukung oleh populasi penduduk muslim yang menduduki peringkat terbanyak kedua di dunia. Berdasarkan artikel yang disajikan pada *website* depokpos.com, berbagai aspek keuangan syariah terus ditingkatkan di beberapa negara, seperti di Singapura, Inggris, Luxemburg, dan Hongkong. Keempat negara tersebut telah fokus dalam menerbitkan obligasi syariah dimulai sejak tahun 2014. Selain itu, Afrika Selatan akhir-akhir ini pun mulai membuat peraturan mengenai *sukuk* atau obligasi syariah (Zakiyah, 2019).

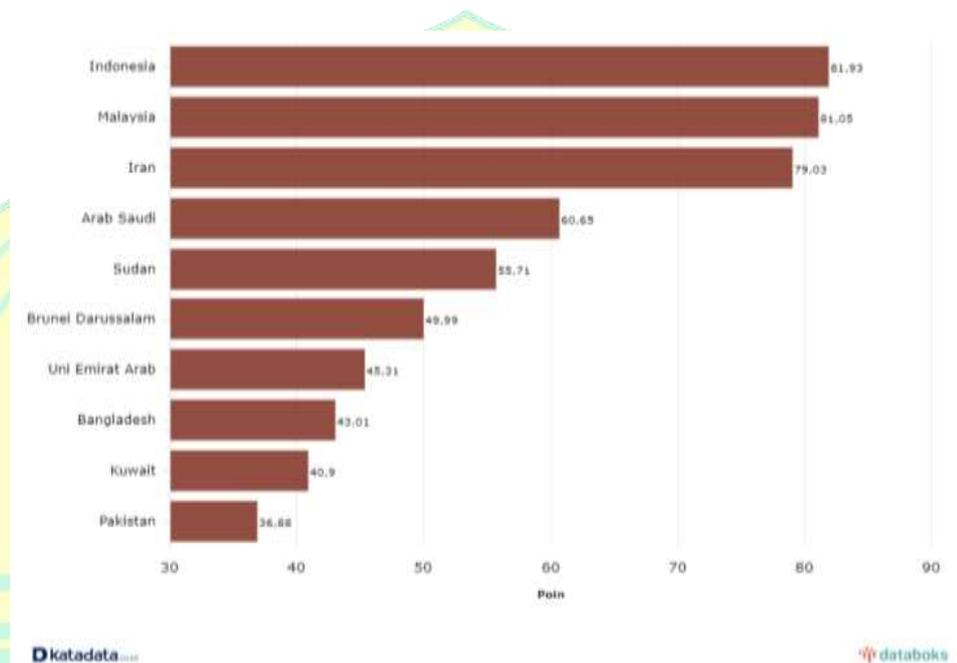
Dari lima negara di atas, Inggris yang telah dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan keuangan syariah di dunia, saat ini kian gencar dalam memperkuat statusnya sebagai pusat keuangan syariah di Eropa. Dilansir dari artikel dalam *website* republika.co.id, Inggris meraih peringkat pertama pasar keuangan syariah global terbesar diantara negara-negara mayoritas non-muslim lainnya. Hal itu kemudian menjadikan Inggris sebagai negara dengan pasar keuangan syariah global terbesar ke-17 dari 48 negara di dunia pada tahun 2019. Berdasarkan pencapaian tersebut, kebutuhan akan keuangan syariah di Inggris kian meningkat. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan dari Thomson Reuters yang

memperkirakan pertumbuhan rata-rata aset keuangan syariah di Inggris akan terus naik hingga 7% selama tahun 2018-2023 (Damhuri, 2019).

Selain di Inggris, Malaysia yang memiliki mayoritas penduduk muslim juga dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem keuangan syariah dengan sangat baik. Di Malaysia, tidak hanya aspek perbankan dan investasi saja yang diperhatikan. Menurut artikel yang terdapat pada *website* hidayatullah.com, Malaysia merupakan salah satu negara yang terus mengupayakan untuk memiliki tata kelola keuangan syariah yang sesuai. Dalam hal pelaporan keuangan syariah, Malaysia bahkan telah memiliki sistem audit syariah tersendiri. Terbukti dengan diterbitkannya *Sharia Government Framework* yang kini dijadikan kerangka dalam pelaksanaan audit atas pelaporan keuangan syariah di Malaysia (Irawan, 2019).

Tidak hanya negara-negara di atas yang telah memiliki sistem keuangan syariah yang baik. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Gambar I.1 dapat diketahui bahwa Indonesia meraih peringkat pertama dalam mengembangkan pasar keuangan syariah diantara sepuluh negara lainnya di dunia sesuai dengan Skor *Islamic Finance Country Index* (IFCI) (Lidwina, 2019). Indonesia mendapat peringkat 1 dengan nilai 81,93. Indikator penilaian tersebut berupa perkembangan kuantitatif, tata kelola, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kesadaran terhadap keuangan syariah. Berdasarkan pencapaian tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat lebih baik lagi dalam menerapkan dan mengembangkan aspek-aspek keuangan syariah, terutama aspek yang

menjadi indikator penilaian khususnya aspek tanggung jawab sosial perusahaan yang sangat berkaitan dengan misi keuangan syariah, yakni memberikan *maslahah* (manfaat) kepada masyarakat.



Gambar I.1
Sepuluh Negara dengan Perkembangan Pasar Keuangan Syariah Tercepat
pada Tahun 2019

Sumber: <http://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020

Aspek tanggung jawab sosial perusahaan kini mulai meluas ke nilai-nilai Islam. Sejak tahun 2002 diperkenalkan istilah pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang merupakan perluasan dari tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan nilai-nilai Islam. Ramadhan (2018) yang meneliti ISR untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap ISR, menjelaskan bahwa ISR pertama kali dibahas dalam penelitian Haniffa (2002). Swandari, Setiawan & Dewi (2018) yang meneliti

ISR untuk menguji pengaruh ISR terhadap nilai perusahaan menyatakan bahwa Haniffa (2002) memperkenalkan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai sebuah solusi untuk menutupi keterbatasan pelaporan sosial berbasis konvensional. Selain itu, dalam penelitian tersebut dijelaskan pula mengenai lima tema pengungkapan ISR yang kemudian dijadikan dasar pengungkapan ISR di suatu perusahaan. Lima tema tersebut mencakup pembiayaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, serta lingkungan.

Berdasarkan penjelasan Deviani & Kusuma (2019) yang meneliti ISR karena melihat adanya determinan ISR di bank syariah, setelah dibahas oleh Haniffa (2002) topik ISR dilanjutkan oleh penelitian Othman, Thani & Ghani (2009) yang membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Dalam penelitian Othman, Thani & Ghani (2009) indeks pengukuran ISR dikembangkan menjadi enam tema pengungkapan yakni pembiayaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, serta tata kelola perusahaan. Indeks inilah yang saat ini dijadikan acuan dalam banyak penelitian terkait.

Hingga kini, pengungkapan ISR di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup baik. Berdasarkan penelitian Qulub, Amin & Junaidi (2019), rata-rata pengungkapan ISR di 13 bank syariah di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 60%-77%. Angka tersebut mencerminkan bahwa pengungkapan informasi tanggung jawab sosial syariah di perbankan syariah sendiri dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun, angka tersebut

belum termasuk perhitungan mengenai pengungkapan ISR di perusahaan non perbankan yang berbasis syariah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penelitian ISR yang lebih fokus pada objek perbankan syariah karena orientasi perbankan syariah yang memang didasarkan pada nilai-nilai islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengungkapan ISR di perusahaan non perbankan berbasis syariah.

Pengungkapan ISR di setiap perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan penelitian Mazri et al. (2019), faktor yang dapat mempengaruhi ISR terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan sekuritas syariah, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Lain halnya dengan penelitian Sari & Helmayunita (2019) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan publik, frekuensi rapat dewan komisaris, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ISR. Adapun berdasarkan penelitian Kurniawati & Yaya (2017), faktor yang dapat mempengaruhi ISR adalah ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR diantaranya adalah ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, kepemilikan institusional,

kepemilikan sekuritas syariah, kinerja lingkungan, dan tentunya masih banyak faktor lain namun tidak dijelaskan disini. Walaupun berdasarkan penjelasan di atas terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR, namun dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada tiga faktor yaitu Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, dan *Good Corporate Governance*.

Faktor pertama yang akan diteliti adalah faktor kinerja lingkungan. Dalam penelitian yang dilakukan Rimayanti & Jubaedah (2017), kinerja lingkungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Kinerja lingkungan merupakan mekanisme perusahaan yang memfokuskan perhatiannya pada kondisi lingkungan sekitar disamping aktivitas operasinya. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan memperluas pengungkapan tanggung jawab sosialnya, demikian pula dengan pengungkapan ISR. Faktor kinerja lingkungan juga diteliti oleh Nuraeni & Muilah (2019). Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki banyak prestasi di bidang lingkungan akan melakukan pengungkapan ISR dengan lebih luas. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Nuraeni & Muilah (2019) kinerja lingkungan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini disebabkan karena terkadang perusahaan hanya menyampaikan informasi keikutsertaannya saja dalam program PROPER dan tidak mencantumkan penilaian PROPER yang diraih. Perusahaan beranggapan bahwa informasi mengenai keikutsertaan

tersebut sudah cukup meningkatkan citranya di mata masyarakat tanpa harus menyertakan penilaian yang diperoleh.

Faktor kedua yang dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan ISR adalah ukuran perusahaan. Menurut penelitian Sunarsih & Ferdiansyah (2017), ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini terjadi karena semakin besar suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan ISR di laporan tahunan. Dalam hal ini perusahaan yang besar tentunya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, oleh karena itu perusahaan harus berusaha untuk membangun citra yang baik di mata masyarakat. Adapun penelitian Cahya, Nuruddin & Ikhsan (2017), yang meneliti tentang faktor ukuran perusahaan menjelaskan bahwa ukuran perusahaan sangat berkaitan dengan teori legitimasi yang mana teori ini merupakan salah satu landasan teori pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hasil tersebut disebabkan karena perusahaan yang kecil cenderung lebih banyak memberikan informasi mengenai ISR untuk menarik perhatian *stakeholder*.

Faktor terakhir adalah *Good Corporate Governance*. Faktor ini terdiri dari tiga aspek yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan ukuran komite audit. Penelitian Kurniawati & Yaya (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dari ketiga aspek tersebut.

Aspek yang pertama dari *Good Corporate Governance* yaitu ukuran dewan komisaris, yang merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Menurut Kurniawati & Yaya (2017), peran dewan komisaris sangat penting di dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin tinggi. Hal ini juga berpengaruh pada proses pelaporan kinerja perusahaan, termasuk pengungkapan ISR. Hasil penelitian Kurniawati & Yaya (2017) tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ISR karena semakin tinggi ukuran dewan komisaris membuat pengungkapan ISR menjadi semakin baik. Penelitian selanjutnya yang meneliti tentang ukuran dewan komisaris adalah penelitian Anggraini & Wulan (2015). Dalam penelitian tersebut, faktor ini dianggap berpengaruh karena jumlah dewan komisaris akan membuat pengawasan atas semua aktivitas perusahaan menjadi lebih optimal, termasuk berkaitan dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian Anggraini & Wulan (2015) tersebut menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi ukuran dewan komisaris, maka semakin rendah pengungkapan ISR. Kemungkinan ini terjadi karena apabila jumlah dewan komisaris lebih banyak, maka intervensinya terhadap laporan tahunan perusahaan pun akan semakin besar dan memungkinkan pengungkapan ISR menjadi lebih sedikit.

Aspek selanjutnya dari *Good Corporate Governance* yaitu proporsi komisaris independen. Komisaris independen merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang berstatus independen di perusahaan. Menurut Prameswari, Saraswati & Sari (2018), proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sebagai pihak yang berperan dalam mengawasi ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, komisaris independen diharapkan dapat menempatkan kepentingan masyarakat sesuai dengan porsi yang seharusnya. Salah satu caranya adalah melalui pengungkapan ISR, karena ISR memuat berbagai hal yang sangat berkaitan langsung dengan masyarakat. Penelitian selanjutnya yang meneliti tentang proporsi komisaris independen adalah Sari & Helmayunita (2019). Dalam penelitian tersebut, faktor ini dianggap berpengaruh karena jumlah komisaris independen yang memadai akan mendukung terlindunginya hak para pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengungkapkan informasi mengenai ISR. Hasil penelitian Sari & Helmayunita (2019) tersebut menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris termasuk komisaris independen tidak terlalu berkaitan dengan pembuatan laporan tahunan perusahaan.

Aspek terakhir dari *Good Corporate Governance* yaitu ukuran komite audit. Berdasarkan hasil penelitian Hasanah, Widiyanti & Sudarno (2017),

ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengungkapan ISR. Faktor ini dianggap berpengaruh karena ukuran komite audit perusahaan yang semakin besar akan meningkatkan tekanan manajemen untuk mengungkapkan ISR karena tingkat pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan lebih tinggi. Penelitian berikutnya yaitu penelitian Sari & Helmayunita (2019). Dalam penelitian tersebut, ukuran komite audit dianggap dapat berpengaruh karena semakin besar jumlah komite audit, maka semakin baik pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen. Hal ini akan memperluas pengungkapan ISR di dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian Sari & Helmayunita (2019) tersebut menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Pengaruh negatif ini disebabkan karena di sebagian besar perusahaan, tugas dan wewenang komite audit tidak mencakup pengungkapan ISR.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan *research gap* berupa *dispute* atau kontradiksi yang dipengaruhi oleh adanya pertentangan dan perbedaan hasil penelitian dari faktor Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, dan *Good Corporate Governance* khususnya dalam aspek Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris independen, dan Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Oleh karena itu, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji ulang faktor-faktor tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, dan Good**

Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, peneliti menemukan *research gap* berupa *dispute* atau kontradiksi yang dipengaruhi oleh adanya pertentangan dan perbedaan hasil penelitian dari faktor Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, dan *Good Corporate Governance* dalam mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah Proporsi Komisaris independen berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
5. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Mengetahui pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
3. Mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
4. Mengetahui pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
5. Mengetahui pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

D. Kebaruan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2016-2018. Dengan memfokuskan pada perusahaan manufaktur saja, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau masukan bagi perusahaan manufaktur terkait dengan pengelolaan sosial dan lingkungannya, khususnya mengenai pengungkapan ISR.

Selain itu, peneliti tertarik untuk meneliti objek perusahaan yang terdaftar di ISSI karena indeks ini mencerminkan keadaan pasar modal syariah di Indonesia. Sedangkan sektor manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur dapat dikatakan lebih sesuai dengan salah satu

variabel yang diteliti, yakni variabel kinerja lingkungan. Perusahaan yang terdaftar di ISSI pada sektor manufaktur mayoritas mengikuti program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengungkapan ISR, sektor manufaktur juga belum diteliti secara khusus. Sektor yang sudah diteliti secara khusus hanya sub sektor pertanian dan sub sektor pertambangan.

Selain itu, peneliti menggunakan total penjualan untuk mengukur variabel ukuran perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* rata-rata menggunakan total aset perusahaan sebagai alat untuk mengukur variabel tersebut. Alasan peneliti menggunakan pengukuran total penjualan sebagai alat ukur ukuran perusahaan adalah dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa besarnya total penjualan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dapat menggambarkan seberapa besar ukuran perusahaan tersebut, sehingga dengan menggunakan alat ukur ini diharapkan penelitian ini dapat referensi penelitian berkaitan dengan tema ukuran perusahaan dan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.